

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia penting bagi seluruh penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai hak warga negara terutama untuk hal-hal yang bersifat mendasar. Pelayanan yang dibutuhkan salah satunya merupakan pemenuhan identitas diri bagi warga negaranya. Wujud dari pemenuhan identitas tersebut melalui administrasi kependudukan. Sejak tahun 2016 pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 membuat kebijakan Kartu Tanda Penduduk untuk anak-anak yang disebut dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga negaranya.

Efektivitas merupakan tercapainya sebuah hasil yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan dan fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan efektivitas organisasi dan ukuran efektivitas menurut Subagyo dalam Budiani (2007) dengan empat indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam aspek ketepatan sasaran bahwa program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Banyumas belum memenuhi sasaran. Dilihat dari sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak jiwa sesuai dengan jumlah penduduk usia 0-16 tahun sedangkan pemilik KIA di tahun 2020 sebanyak jiwa. Kemudian pada aspek sosialisasi program dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan informasi yang disebarkan tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam aspek tujuan program juga belum terlaksana dengan baik karena masih adanya pelayanan publik yang belum sepenuhnya menggunakan KIA dan belum ada kebijakan resmi tentang kewajiban penggunaan KIA untuk dibidang pendidikan. Selanjutnya dalam pemantauan program belum berjalan dengan baik karena belum adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Banyumas masih belum efektif karena belum adanya kebijakan dan aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah Banyumas dalam hal penggunaan Kartu Identitas Anak, selanjutnya belum adanya pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai keberhasilan dan pencapaian program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Efektivitas, Kartu Identitas Anak

SUMMARY

Indonesia is a large country in terms of population, with a large number of people in Indonesia, it is important for all citizens to get public services as a citizen's right, especially for basic things. One of the services needed is the fulfillment of self-identity for its citizens. The manifestation of fulfilling this identity is through population administration. Since 2016 the government through the Minister of Home Affairs Regulation No.2 of 2016 has made a policy on Identity Cards for children called Child Identity Cards (KIA). This policy is the government's attempt to fulfill its obligation to provide a residential identity to all its citizens.

Effectiveness is the achievement of a planned result and a measure of the extent to which a program can carry out its activities and functions so that it can achieve predetermined goals. This study uses organizational effectiveness and effectiveness measures according to Subagyo in Budiani (2007) with four indicators of effectiveness, namely target accuracy, program socialization, program objectives and program monitoring.

The results of this study indicate in the aspect of targeting accuracy that the Child Identity Card program in Banyumas Regency has not met the target. Judging from the target to be achieved by the Department of Population and Civil Registry, there are as many people according to the total population aged 0-16 years, while the number of KIA owners in 2020 is as many as people. Then in the socialization aspect of the program, it can be said that it is less effective because the information that is distributed is not conveyed thoroughly to the public. In the aspect of program objectives it has also not been implemented properly because there are still public services that have not fully used MCH and there is no official policy regarding the mandatory use of KIA for education. Furthermore, program monitoring has not been going well because there is no periodic monitoring and evaluation.

The conclusion of this research is that the Child Identity Card program in Banyumas Regency is still not effective because there are no official policies and rules made by the Banyumas government regarding the use of Child Identity Cards, furthermore there is no periodic monitoring carried out by the Department of Population and Civil Registry regarding success and the achievement of the Child Identity Card program in Banyumas Regency.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Efektivitas, Kartu Identitas Anak